

## SEMINAR

# TANTANGAN MENUJU KEADILAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN PERSPEKTIF INDONESIA DAN ASIA TIMUR

## KERJASAMA

PROGRAM STUDI KAJIAN GENDER PPS-UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN BANK DUNIA

Hotel Acasia Jakarta, 25 Juni 2012

### Pembukaan

oleh Ibu Shelly Adelina, MS.I

- Ucapan selamat datang bagi para hadirin serta membuka seminar hasil penelitian yang berlangsung atas kerjasama Program Studi Kajian Gender, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Bank Dunia. Tema dari seminar ini adalah "*Tantangan Menuju Keadilan dan Gender Dalam Pembangunan Perspektif Indonesia dan Asia Timur*".
- Membacakan urutan susunan acara yang terdiri dari ;

#### I. Acara pembukaan :

- Sambutan ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Dr. Kristi Poerwandari
- Sambutan Mr. Stefan G. Koeberle, Country director World Bank

#### II. Acara Inti:

- Talkshow yang akan dipandu oleh Bapak Mayong Suryo Laksono
- Pembicara terdiri dari :
  - Mr. Andrew Mason, Lead Economist Bank Dunia dan lead author untuk "Menuju Kesetaraan Gender di Asia Timur dan Pasifik: Laporan Pendamping Laporan Pembangunan Dunia 2012" bersama rekannya Katherine Patrick, Junior Professional Associate
  - Ibu Sri Danti Anwar, Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Ibu Ninik Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan
  - Bapak Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI
- Sesi diskusi dan Tanya jawab

### III. Acara Penutup

Ucapan terima kasih dan penyerahan cendramata oleh Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Dr. Kristi Poerwandari

#### **ACARA PEMBUKAAN**

1. Sambutan Ketua Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia, Dr. Kristi Poerwandari.

Salam Sejahtera bagi bapak dan ibu sekalian,

- Secara khusus kami mengucapkan penghormatan kepada Mr.Koeber, Mr. Andrew Mason, Ibu Sri Danti Anwar, Ibu Ninik Rahayu dan Bapak Ganjar pranowo serta bapak ibu sekalian yang kami hormati yang telah bersedia hadir dalam diskusi dengan topik "Tantangan Menuju Keadilan dan Gender Dalam Pembangunan Perspektif Indonesia dan Asia Timur".
- Secara umum penelitian ini menunjukkan bahwa tercapainya kesetaraan gender tidak hanya menguntungkan perempuan tetapi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Kesetaraan gender dalam ekonomi akan meningkatkan produktifitas pertumbuhan dan mempercepat penghapusan kemiskinan. Selain itu, kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga juga dapat memunculkan rasa nyaman karena perempuan dan laki-laki dapat bekerjasama tanpa saling merendahkan dan terjalin hubungan yang saling mendukung serta saling menghormati. Seperti kata Ibu Samsiah bahwa perlu terjalin "kerjasama yang tulus" artinya kerjasama antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan atas paksaan, ketidakrelaan, kepura-puraan tetapi benar-benar kerjasama yang tulus.
- Walaupun demikian, tantangan baik melalui kebijakan dan implementasi yang adil gender masih sangat besar dirasakan, misalnya perdebatan dalam media tentang RUU KKG yang masih terus berlangsung.

- Dalam kesempatan ini, saya ingin memaparkan bahwa ada dua hal yang muncul secara bersamaan. Pertama, dengan hadirnya laporan baru Bank Dunia dengan tema " Toward Gender Equality In East Asia and the Pacific, A Companion to the World Development Report". Khusus di Indonesia beberapa waktu ini kita mendengar ramainya wacana penolakan terhadap RUU KKG yang konsepnya telah dipersiapkan oleh DPR maupun Pemerintah. Sesungguhnya RUU ini sangat baik tujuannya, yaitu untuk memastikan bukan hanya lembaga Eksekutif tetapi juga lembaga legislative dan yudikatif turut aktif memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender ini.
- Dengan latar belakang demikian, Bank Dunia dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia bekerjasama menyelenggarakan acara ini dengan tujuan untuk melihat kecenderungan regional yang akan diangkat dalam laporan Bank Dunia serta secara khusus kita akan membahas temuan di Indonesia dengan menghubungkan pada kenyataan yang kita hadapi saat ini. Hal lain yang menurut saya cukup penting adalah mengeksplorasi berbagai strategi yang dianggap efektif untuk menghadapi situasi ini untuk memastikan tercapainya kesetaraan gender.
- Kami juga hendak melaporkan bahwa peserta dari diskusi pada siang hari ini meliputi wakil dari pemerintah, wakil dari parlement, wakil dari perguruan tinggi, peneliti, pemerhati kajian gender, para mitra pembangunan dari lembaga nasional dan juga lembaga internasional serta para pekerja media yang akan ikut membantu kita menyuarakan persoalan kesetaraan gender.
- Pada kesempatan ini, Kami juga ingin berterimakasih atas kehadiran ibu dan bapak dan berharap pertemuan ini dapat membuka pemahaman akan persoalan kita bersama serta berbagai strategi efektif yang harus kita tempuh. Topik pada kesempatan ini merupakan topik yang serius dan cukup sering menghadapi pertentangan yang akhirnya meributkan suatu hal yang hanya menjadi debat kusir. Dengan demikian, kami mengundang Bapak Mayong Suryo Laksono untuk dapat memandu diskusi ini agar lebih santai, informal, tetapi juga substantif dalam bentuk talkshow. Sekiranya hanya ini yang dapat kami laporkan, sekali lagi kami mengucapkan banyak terimakasih kepada Bank Dunia atas usahanya, para pembicara dan moderator serta kehadiran bapak ibu siang. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari persiapan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wasalamuwallaikum.

## 2. Sambutan Mr. Steven Koeberle, Country director World Bank

Saya sangat senang pada kesempatan ini dapat berjumpa dengan saudara sekalian untuk mendengarkan hasil laporan Bank Dunia tahun 2012 yang

nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Namun, sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tidak dapat berbahasa Indonesia sehingga berkenankan saya menyampaikan sambutan ini dalam bahasa Inggris.

- Berbicara mengenai kesetaraan gender cukup erat kaitannya dengan pertumbuhan pendapatan yang kemudian menjadi salah satu kunci untuk menurunkan angka kematian ibu. Oleh karena itu, isu kesetaraan gender adalah kunci terhadap keseuksesan pembangunan di suatu negara.
- Berbicara mengenai perempuan dan pembangunan bukan hal yang asing lagi bagi kita. GAD yang telah ada merupakan satu kemajuan dalam pembangunan dengan memberikan kesempatan dan akses bagi perempuan untuk masuk dalam proses pembangunan yang ada
- Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mampu menerapkan konsep pemberdayaan perempuan sebagai salah satu isu penting di lembaga pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penurunan kesenjangan gender terus berlangsung.
- Pada kesempatan ini kami dari Bank Dunia ingin memaparkan hasil kajian yang telah dilakukan tentang kesetaraan gender pada dua wilayah yaitu di Asia Timur dan Pasifik. Kesetaraan gender bukan hal yang asing lagi bagi kita semua, apabila berbicara mengenai kesetaraan gender tidak hanya mengacu pada kesempatan tetapi konsep kesetaraan gender sangat penting dalam suatu proses pembangunan. Hasil temuan yang kami peroleh di Asia Timur dan Pasifik menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender melalui skill dan kemampuan, tetapi juga ada peningkatan yang signifikan sehingga korelasinya menjadi jelas bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam konteks Indonesia adalah suatu pencapaian yang sangat baik karena kesetaraan gender di Indonesia telah mengalami peningkatan baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan dan partisipasi kerja sebagaimana yang kita lihat dalam statistic. Perwakilan perempuan di ranah publik juga terus mengalami peningkatan serta banyak perempuan telah mampu menggunakan haknya.
- Tetapi, yang masih perlu diturunkan adalah angka kematian ibu serta perlu adanya peningkatan dalam akses perkreditan sehingga pencapaian kesejahteraan dapat dirasakan secara menyeluruh. Dalam kesempatan ini, saya tidak akan menyampaikan secara rinci karena kedua rekan saya yang akan melakukan persentase hasil kajian yang dilakukan terhadap dua wilayah Asia Timur dan Pasifik. Untuk mempersingkat waktu, saya membuka sesi diskusi kita dan pemaparan hasil laporan penelitian Bank Dunia yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih.

## II. Acara Inti

- Talkshow yang akan di pandu oleh Bapak Mayong Suryo Laksono
  - Berbicara mengenai gender selalu ada permasalahan dari dulu hingga sekarang. Dalam kesempatan dan acara seperti ini yang mendominasi adalah kaum ibu-ibu, namun dominan ini tidak hanya sebatas pada kuantitas tetapi juga dominan suara.
  - Acara pertama-tama akan dimulai dengan pemaparan hasil penelitian melalui persentase yang akan di bawakan oleh Mr. Andrew Mason, Lead Economist Bank Dunia bersama rekannya Katherine Patrick, Junior Professional Associate. Dalam pemaparan hasil kajian ini tidak hanya menyajikan isu-isu kesetaraan gender di Indonesia tetapi juga di seluruh wilayah Asia Pasifik. Untuk mempersingkat waktu saya akan mengundang pada pembicara untuk ke depan dan acara talkshow kita siang hari ini dapat dimulai
- Presentasi Hasil Penelitian, oleh Mr. Andrew Mason dan Katherine Patrick dengan tema "Menuju Kesetaraan Gender di Asia Timur dan pasifik"
- Tanggapan Moderator terhadap persentase Bank Dunia
  - Terima kasih Andrew dan Katherine atas pemaparan hasil presentasinya. Kita sudah mendengar tinjauan umum seperti yang dipaparkan bahwa konsep kesetaraan gender di negara-negara lainnya dan Indonesia masih cukup memprihatinkan. Hal ini merupakan suatu temuan umum yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian lanjutan atau untuk melihat kondisi secara khusus di Indonesia.
  - Kesempatan berikutnya akan diberikan kepada Ibu Ninik Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan yang akan menyampaikan apa saja yang telah dilakukan dan apa saja persoalan yang dihadapi serta bagaimana mengatasi masalah-masalah yang memprihatinkan belakangan ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Mr. Andrew tadi. Selain itu, bagaimana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat mencari solusi persoalan ini, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dibahas dan langkah apa yang telah ditempuh ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Ibu Sri Danti Anwar dari KPPA untuk memaparkan strategi dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

- Ibu Sri Danti Anwar, Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selamat siang bapak ibu sekalian,

- Kami dari kementerian KPPA diminta untuk membawakan materi dengan tema "Kebijakan Pemerintah Mengenai Pengarusutamaan Gender, Berbagai Tantangan serta Strategi Ke Depan".
- Indonesia sebetulnya jikalau kita berbicara mengenai kesetaraan gender landasan hukumnya sudah jelas. Pertama, UUD 1945 dan berbagai pasal yang sudah di amandamen sangat jelas berbicara mengenai kesetaraan gender terutama teruang dalam pasal 28 ayat A sampai dengan J. selain itu dalam satu pasal UUD menyebutkan adanya kebijakan affirmative action untuk mengejar ketertinggalan bagi perempuan. Kedua, Indonesia sudah sangat komit dengan upaya-upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang tertuang dalam UU No 7/1984. Selanjutnya pemenuhan HAM termasuk hak asasi perempuan yang tertuang dalam UU No 30/1999. Jika ditinjau dari konsep pembangunan yang ada, Indonesia sejak tahun 2000 sudah memiliki strategi pengarusutamaan gender menjadi salah satu strategi landasan operasional baik di pusat maupun di daerah untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender
- Tadi disampaikan oleh Mr. Andrew tentang kesetaraan gender di Asia Timur dan Pasifik, di Indonesia saya mengacu kepada data SUSENAS BPS tahun 2011 bahwa IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia berada pada urutan 127 dari 187 negara. IPG (Indeks Pembangunan Gender) Indonesia menduduki posisi 67,20%.
- Sesungguhnya nilai dari IPG hampir sama dengan IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetapi secara spesifik IPG lebih mengacu pada data terpilah antara laki-laki dan perempuan serta anak perempuan maupun anak laki-laki. Indikator pencapaian kesetaraan gender bisa dilihat dari GEM (Gender Empowerment Measure) Indonesia sebesar 68,15%. yang dinilai dari GEM adalah pencapaian keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan sumbangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara IPM dan GEM sehingga tidak dapat mencapai nilai yang sejajar.

- Meskipun demikian ada progress yang telah dicapai. Dalam sektor pendidikan, angka partisipasi di tingkat SD, SMP, dan SMA antara perempuan dan laki-laki tidak terjadi kesenjangan sehingga target MDGs 2015 dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Namun, dalam sector pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena pencapain yang diperoleh hingga saat ini masih berada dibawah 90%. Selain itu, angka melek huruf di Indonesia juga telah mengalami penurunan, namun angka buta huruf bagi perempuan secara umum masih dua kali lipat dari laki-laki meskipun telah ada perbaikan. Oleh karena itu upaya pemberantasan buta huruf bagi perempuan masih perlu di tingkatkan lagi. Selain itu rata-rata sekolah juga meningkat dari tahun lalu perempuan 7,50% dan laki-laki 8,34%. Meskipun telah terjadi peningkatan tetapi secara umum kualitas SDM masih perlu ditingkatkan lagi.
- Umur harapan hidup juga mengalami peningkatan yaitu perempuan 71,47% dan jumlah pencapaian ini lebih tinggi dari laki-laki 67,51%. Meskipun dari pemaparan Bank Dunia bahwa angka harapan hidup perempuan 240/100.00, tetapi berdasarkan data BPS 2010 angka harapan hidup perempuan sebesar 228/100.000. Hal ini menunjukkan bahwa data memang sangat bervariasi tergantung siapa yang mengumpulkan data, dalam hal ini pemerintah cenderung mengacu pada data BPS.
- Dari aspek ekonomi dan ketenagakerjaan, tingkat partisipasi perempuan 51,67% dan laki-laki 83,60%. Meskipun jumlahnya masih berada di bawah laki-laki tetapi partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis pekerjaan sebagai tenaga kepemimpinan umumnya masih didominasi oleh laki-laki yaitu 81,95% dan perempuan 18,05%, selain itu, rata-rata jam kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki seperti yang di paparkan oleh Bank Dunia. Kalau mengukur jam kerja perempuan dalam seminggu 35 jam, perempuan hanya 56,83% dan laki-laki 73,07%. Rata-rata upah pekerja perempuan lebih rendah dari laki-laki sama seperti yang dikemukakan oleh Bank Dunia yaitu dibawah \$1.00. Di Indonesia, dengan pekerjaan yang sama seperti manufaktur tetapi upah yang diterima tidak sama untuk jenis pekerjaan yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini PNS tidak termasuk karena PNS sudah memiliki perhitungannya sendiri sesuai dengan pangkat dan jabatan tetapi di luar dari itu masih terjadi diskriminasi dalam pengupahan.
- Di bidang politik, sudah disampaikan dalam penelitian bahwa hasil pemilu tahun 2009 yang menyertakan 57% pemilih perempuan diwakili

oleh 80% seluruh anggota DPR dan anggota DPD sebesar 50%. Memang pada pemilu sebelumnya ada kenaikan tetapi kalau kita berbicara kuota 30% memang masih jauh dan perlu di tingkatkan lagi upaya-upaya untuk meningkatkan representasi perempuan di parlemen.

- Persentase perempuan yang menduduki jabatan pengambilan keputusan di eksekutif juga belum berubah banyak. Di tingkat eselon 1 perempuan 9,6% dan laki-laki 90,4%, di eselon 2 perempuan berada dibawah 10% dari laki-laki. Dari sisi kepala desa dominasinya tetap laki-laki. Salah satu penyebabnya juga adalah keterbatasan calon yang ada. Oleh karena itu perlu di dorong adanya affirmative action bagi keterwakilan pemimpin perempuan.
- Pencapaian pengarusutamaan gender, kementerian KPPA memiliki mandate untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan terkait perempuan dan anak di pusat dan daerah serta melakukan monitoring dan evaluasi. Terkait PUG bahwa kemajuan yang telah dicapai antara lain, Pertama, sudah ada upaya untuk mendorong gender budget statement di kementerian lembaga yang sebelumnya melalui peraturan menteri keuangan. Pada tahun 2009 pertama kali memuat peraturan tentang pengesahan, 2010 memuat penerapan anggaran responsive gender.
- Sebelumnya sudah ada di bapenas suatu tim khusus yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan penganggaran yang responsive gender. Kemudian dimulai tahun 2010 sudah terdapat pilot di beberapa kementerian lembaga untuk melaksanakan PPRG (gender budgeting). Saat itu empat kementerian yang dijadikan sebagai contoh yaitu DIKBUD, Kesehatan, PU dan Pertanian serta tiga kementerian sebagai pemandunya yaitu kementerian keuangan, Bapenas dan KPPA. Tahun 2013 diharapkan akan ada 28 kementerian lembaga yang sudah mampu menerapkan PPRG.
- Kemajuan lainnya, di daerah cenderung mengacu pada Permendagri No 15/2008 yang akhirnya di revisi Permendagri No 7/2011. Disini yang bertanggung jawab terkait dengan gender adalah para wakil gubernur maupun para wakil bupati Kabupaten dan Kota. Sedangkan untuk pelaksanaannya dibantu oleh institusi yang menangani perempuan dan anak yang disebut badan perempuan dan KB serta badan perempuan dan pembangunan masyarakat yang akan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat pusat.



- Impres No 9/2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional memang di dorong agar setiap kementerian lembaga membentuk focal point gender di masing-masing kementerian lembaga. Jadi setiap kementerian lembaga yang melaksanakan PUG harus membentuk focal poin gender maupun gender working group baik di pusat maupun di daerah, kemudian kami akan membantu para stakeholders melakukan pengarusutamaan gender, serta menerbitkan profil gender melalui data terpilah perempuan dan anak di berbagai bidang dan juga untuk melakukan analisis berperspektif gender. Saat ini sudah dikembangkan apa yang disebut dengan GAP (Gender Analisis Pathway) yaitu suatu alat yang disusun bersama dengan Bappenas untuk membantu perencanaan baik di pusat maupun di daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang berperspektif gender.
- Kemajuan lainnya, di sisi kelembagaan ada sistem koordinasi yang dibentuk di Kabupaten Kota melalui tim pokja PUG. Di daerah pokja diketuai oleh Bappeda.
- Dalam melaksanakan PUG tidaklah mudah karena berbagai faktor. Pertama, dari sisi pemahaman masih seringkali gender diartikan sebagai perempuan. Kedua, gender dianggap kebaratan oleh karena itu tidak cocok diterapkan di Indonesia. Ketiga, data terpilah juga menjadi tantangan karena kita sampai saat ini belum mampu merekord data dengan baik. Oleh karena itu melalui kajian wanita kita mendorong kerjasama dalam menghadirkan data terpilah untuk membuka wawasan tentang situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Sejak tahun 2005, kami juga sudah memberikan gender reword sebagai salah satu award oleh pemerintah kepada semua pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan setiap memperingati hari ibu. Sekarang gender reword tidak hanya sebagai penghargaan bagi pengarusutamaan gender tetapi juga bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari pengarusutamaan gender.
- Tantangan pelaksanaan PUG yaitu masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, lemahnya kelembagaan, pergantian gender focal poin sehingga aplikasi pembelajaran yang diberikan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kedepannya tergantung pada individu-individu. KPPA sedang mengembangkan sistem monitoring evaluasi yang komprehensif. Selain itu belum meratanya pemahaman mengenai gender serta masih bervariasinya pemahaman akan gender. Selain itu, komitmen juga berbeda-beda

menjadi kendala. Misalnya di daerah ketika dilakukan evaluasi, indikator anggarannya sangat kecil. Hal ini juga terjadi di pusat, oleh karena itu perlu adanya peningkatan komitmen.

- Berbicara mengenai PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kementerian tetapi tanggung jawab bersama melalui suatu gerakan baik itu pemerintah, DPR sehingga DPR dapat berkomitmen untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang responsive gender dan anggaran yang berperspektif gender. Hal ini tidak dapat terlaksana dengan hanya mengandalkan satu kementerian saja. Kementerian KPPA memang bertugas untuk melakukan pengembangan kapasitas, melakukan advokasi, memperlihatkan kajian-kajian tentang pentingnya kesetaraan gender. Maka dari itu, kajian Bank Dunia ini sangat baik sebagai pintu masuk bagi kita semua bahwa apabila kita berpikir tentang pembangunan tidak hanya bergantung pada satu kelompok jadi intinya bagaimana kita menyusun suatu kebijakan yang inklusif dan tidak bersifat diskriminatif.
- Untuk melakukan pengarusutamaan gender perlu adanya ketrampilan melakukan analisis yang berperspektif gender. Hal ini kadang-kadang sulit, untuk itu KPPA mendorong dengan adanya struktur baru dalam memberikan pendampingan terkait ekonomi, sosial dan hukum. Dengan adanya peraturan menteri keuangan memang semua kementerian lembaga wajib melakukan gender budgeting dan KPPA sedang aktif memberi dampingan dan juga melihat usulan dari kementerian lembaga apakah sudah menggunakan teknis analisis gender dalam ToR. Selanjutnya mereka akan didampingi sebelum mengajukan anggaran keuangan kepada kementerian keuangan. Mekanisme ini yang sedang berlangsung dalam penyusunan anggaran bagi suatu kementerian. Jadi target untuk 2013 akan berkembang menjadi 28 kementerian lembaga. Memang tidak semua berperspektif gender tetapi program yang kita dorong adalah penghapusan kemiskinan yang menjadi salah satu entri poin bagi pelaksanaan program dari 14 program yang ada.
- Berbicara mengenai dana seringkali di daerah tidak tahu akan didapatkan dana yang ada tersebut. Hal ini menjadi tantangan juga sehingga perlu memberikan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan dana-dana yang ada melalui peningkatan kerjasama dengan swasta dan dengan organisasi masyarakat sehingga tidak hanya tergantung pada APBN maupun APBD.
- Strategi kedepannya sesuai dengan RPJM, pertama untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan terutama di

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta perluasan politik melalui pengambilan keputusan. Kedua, meningkatnya cakupan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, memperkuat efektifitas dari kelembagaan yang menangani pengarusutamaan gender.

- Dalam RKP 2013 PUG menjadi salah satu pintu masuk operasional pelaksanaan mandate di masing-masing kelembagaan baik di pusat maupun di daerah. Tetapi dalam hal ini tidak semua program dapat kita genderkan, ada beberapa program yang perlu adanya PUG sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, menghapus kemiskinan dan penguatan kapasitas.

- **Ibu Ninik Rahayu, Komisioner Komnas Perempuan**

Terima kasih, assalamuwalaikum. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semua.

Pada kesempatan ini, saya juga diminta oleh panitia untuk membawakan presentase dengan tema "Kajian Komnas Perempuan Mengenai Berbagai Kebijakan di Tingkat Nasional dan Daerah Terkait Perjuangan Menuju Keadilan Gender, Serta Usulan Strategi Untuk Memastikan Pencapaian Keadilan Gender"

- Sebelum saya memulai presentasi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan Komnas Perempuan yaitu salah satu lembaga nasional HAM yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan yang ada dan proses penyusunan kebijakan-kebijakan. Kami juga melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan yang ada dan hasil analisis pemantauan yang kami lakukan menjadi dasar advokasi kebijakan kita baik kepada pemerintah, badan Legislative maupun Yudikatif. Semua ini ditujukan untuk membangun situasi yang kondusif dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan.
- Sebagaimana yang diminta oleh panitia, pertama-tama secara singkat saya akan memberikan tanggapan terhadap pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan juga apa yang ditemukan oleh Komnas Perempuan serta bagaimana strategi kedepan untuk menghapuskan diskriminasi dan tantangan-tantangan yang dihadapi.
- Pertama, secara umum hasil kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia terhadap pentingnya penghapusan diskriminasi gender ini dan apa

yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Danti semakin menguatkan kita semua bahwa gender adalah konstruksi sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang, laki-laki maupun perempuan di dalam masyarakat di dalam pembangunan secara keseluruhan baik itu terkait dengan akses, kontrol maupun manfaat yang akan diberikan. Hal ini menjadi dasar yang sangat penting bagi pengetahuan kita semua agar kita memiliki kesamaan pendapat.

- Kedua, dari cara analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia ini juga memberikan gambaran lebih mudah bagi kita bahwa tidak semua orang mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun bisa dikatakan bahwa semua masyarakat mengalami diskriminasi gender meskipun dalam bentuk dan tingkatan yang berbeda begitu juga yang ada di Indonesia. Kesenjangan ini saling terkait dengan kesempatan, sumber daya ekonomi, kekuasaan dan partisipasi politik yang hampir terjadi di semua elemen pembangunan di Indonesia. Dalam konteks seperti itu tergambar dengan jelas melalui data-data yang disampaikan bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban diskriminasi dan yang paling dirugikan dalam pembangunannya.
- Gambaran situasi yang juga muncul dari laporan ini adalah beban kehidupan manusia adalah beban pembangunan. Oleh karena itu, ketika kesetaraan gender tidak memberikan beban yang sama baik produktifitas dan efisiensi ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi. Saya kira ini akan menjadi data-data yang sangat penting untuk nantinya kita dapat menahan akumulasi SDM baik di pasar tenaga kerja dan lain sebagainya yang selama ini kurang lebih masih banyak terjadi pengecualian terhadap perempuan khususnya pada sektor-sektor tertentu.
- Gambaran ketidakadilan gender yang tergambar disini adalah; Pertama melalui institusi masyarakat. Disebutkan bahwa norma sosial, adat istiadat, hak dan hukum sebagaimana yang terjadi di dalam institusi ekonomi dan pasar juga membentuk peran hubungan laki-laki dan perempuan. Kedua adalah rumah tangga yang juga memainkan peran yang sangat penting bagi perempuan di dalam pengambilan keputusan. Hal ini diwarisi dari satu generasi ke generasi lain perkembangan diskriminasi karena di dalam rumah tangga juga ikut menentukan keputusan dan menentukan bagaimana tempat pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini memiliki investasi yang cukup besar dalam rangka upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Dikatakan dalam penelitian ini bahwa institusi masyarakat dan rumah tangga secara makro bersama-sama ikut

menentukan kesempatan dan prospek hidup seseorang berbasis gender, dan keduanya merepresentasikan pintu masuk yang cukup penting dalam penyusunan kebijakan publik.

- Hal-hal umum yang saya lihat melalui hasil penelitian ini menurut saya cukup penting untuk menjadi dasar bagi kita semua kalangan masyarakat bahwa penghapusan diskriminasi berbasis gender adalah hal yang prioritas. Meskipun dari gambaran dua ketidakadilan gender tadi kami dari Komnas Perempuan menemukan fakta yang lain bahwa tidak hanya institusi masyarakat dan rumah tangga yang memiliki kontribusi positif terhadap sulitnya penghapusan diskriminasi tetapi kami juga menemukan hal lainnya.
- Selama reformasi hingga saat ini sudah empat belas tahun Komnas Perempuan berdiri. Kami menemukan penghapusan diskriminasi sendiri ada terobosan-terobosan, ada kemunduran, ada kegagalan dan ada tantangan untuk mendekati keadilan gender. Pertama, cara memaknai kesetaraan gender yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang di sampaikan oleh Bank Dunia. Kami berpendapat bahwa memaknai kesetaraan gender tidak mengartikan kesetaraan gender ini sebagai kesetaraan apa yang dihasilkan, karena seperti kita ketahui bahwa tiap-tiap masyarakat dan budaya dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya pencapaian kesetaraan gender. Hal ini menjadi sangat penting karena ketika Komnas melakukan pemantauan di beberapa wilayah ditemukan bahwa gender itu tidak universal serta strategi pencapaiannya juga beraneka ragam. Oleh karena itu mengartikan kesetaraan gender bukan kesetaraan apa yang dihasilkan. Kedua, kesetaraan lebih dimaknai secara implisit adalah sebuah kebebasan bagi perempuan dan laki-laki untuk memilih peran dan akibat-akibat berbeda yang disesuaikan dengan pilihan dan tujuannya masing-masing, termasuk kesepakatan masyarakat lokal dan dalam konteks Indonesia adalah sesuai dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Seperti yang saya sampaikan bahwa hasil pemantauan kami dalam konteks penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan selama 14 tahun ini ada beberapa terobosan yang sangat baik. Misalnya, ada 29 kebijakan baru baik di tingkat nasional dan internasional termasuk yang terakhir diratifikasinya migran 1990. Kemudian ada 236 lembaga baru dari Aceh sampai Papua yang melakukan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Terobosan lainnya adalah ketika disahkannya UU PKDRT yang menjadi suatu pencapaian fundamental di mana kekerasan yang sebelumnya

menjadi isu privat kemudian menjadi isu publik dan kekerasan di dalam rumah tangga dapat dikriminalisasikan.

- Disamping kemajuan-kemajuan itu ada juga kemunduran. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bukan hanya institusi sosial dan rumah tangga yang berkontribusi, kemunduran lain adalah diskriminasi gender ini justru dilahirkan karena kebijakan-kebijakan. Seperti kita ketahui, diskriminasi gender bisa terjadi karena adanya konstruksi yang membedakan laki-laki dan perempuan. Tetapi di Indonesia ada hal yang berbeda bahwa diskriminasi gender justru dikonstruksi melalui kebijakan baru melalui otonomi daerah. Sampai bulan Maret 2012 kami menemukan adanya 207 kejadian daerah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan mulai dari mengkriminalisasi tubuh perempuan, pengendalian tubuh perempuan dan juga pembatasan akses perempuan serta kebebasan berekspresi perempuan juga dilakukan pembatasan.
- Kemunduran yang lain adalah ada beberapa kebijakan daerah terkait pengaturan soal migrasi bukan mengatur bagaimana perempuan dapat bermigrasi secara aman dan bagaimana memberikan perlindungan pada perempuan tetapi justru lebih banyak mengatur soal bagaimana tenaga migran semata-mata mencari pekerjaan dan mencari sumber pendapatan tanpa ada perspektif perlindungan sama sekali. Kemunduran lainnya adalah pembiaran aksi kekerasan oleh sipil bersenjata preman di wilayah-wilayah konflik serta eksploitasi sosial oleh aparat keamanan.
- Selain kemunduran, kami juga menemukan adanya kegagalan. Seperti kita ketahui tragedi Mei 1998, tragedi Timor-Timur, Aceh, Papua, dan Poso. Tetapi sampai hari ini perempuan korban, misalnya di Poso 65 orang korban kekerasan seksual belum terungkap fakta kebenarannya, belum terpenuhi rasa keadilan dan juga belum terpenuhi pemulihan yang menjadi hak mereka.
- Tantangan yang juga dihadapi, seperti tadi disampaikan dengan adanya UU PKDRT sebagai suatu fenomena nyata juga membuahkan persoalan. Pertama, sampai hari ini belum secara penuh digunakan oleh hakim-hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara kasus-kasus perempuan dalam perkawinan dan keluarga. Kedua, belum ada standar layanan yang terbaik bagi perempuan korban kekerasan sehingga masing-masing wilayah dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya seringkali menerjemahkan secara berbeda. Misalnya, ada satu upaya yang cukup progresif dilakukan oleh KPPA dengan mengeluarkan SPM (standar pelayanan minimal) bagi korban.

Tetapi sayangnya standar ini dipahami oleh daerah hanya untuk korban KDRT dan trafiking maka perempuan-perempuan korban kekerasan dalam konteks konflik SDA misalnya di Bima dan Maluku tidak dapat terlayani dengan baik.

- Perlindungan saksi dan korban, meskipun telah ada UU perlindungan saksi dan korban namun upaya perlindungan belum secara maksimal dijalankan. Tiga hari yang lalu ada korban yang justru menjadi tahanan dalam satu rumah bersama dengan tersangka. Hal ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dirasakan oleh korban.
- Tantangan lainnya adalah konsistensi lembaga-lembaga negara. Kami melihat bahwa belum ada kesatuan pendapat antara aparat pemerintah dan legislative serta yudikatif dalam konteks menghapus diskriminasi, mengidentifikasi kekerasan berbasis gender dan menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Hal ini menjadi luar biasa bagi konteks perempuan mencari keadilan. Selain itu, perempuan korban masih sulit mengungkapkan kebenaran, memperoleh keadilan dan mendapatkan pemulihan sebagaimana hak yang sudah diatur dalam hukum dan kebijakan.
- Saya juga ingin meminta klarifikasi dari Bank Dunia di dalam laporannya tadi mengungkapkan kekerasan yang dialami perempuan baik di ranah privat maupun di ranah publik tetapi sangat disayangkan tidak ada data dari Indonesia. Kami ingin memaparkan hasil temuan Komnas Perempuan mengenai catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2011. Komnas Perempuan menemukan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat. Pertama, yang tertinggi adalah di ranah domestic yaitu mencapai 95,61%. Kedua, kekerasan di ranah komunitas dengan bentuk bermacam-macam seperti; perkosaan, pelecehan seksual dan lainnya termasuk di tempat kerja. Ketiga, kekerasan di ranah negara yang diidentifikasi adalah ketika pejabat negara dalam masa jabatannya melakukan kekerasan terhadap perempuan, ketika pejabat negara melakukan pembiaran terjadinya kekerasan terhadap perempuan, serta ketika pejabat negara terlibat dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Saya menyimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan juga kami temukan di tiga ranah tersebut.
- Isu lainnya berdasarkan pengaduan yang kami terima bahwa sampai saat ini perempuan-perempuan yang bekerja di sektor buruh manufaktur dan jasa ditempatkan secara berbeda bahwa adanya

segregasi jenis pekerjaan laki-laki dan perempuan. Akibatnya adalah sistem kerja perempuan tidak memiliki kontrak, tidak memperoleh fasilitas pelatihan-pelatihan dan memperoleh upah yang lebih rendah serta apabila hamil lebih mudah untuk diminta mengundurkan diri. Terjadi perbedaan yang signifikan dengan laki-laki ketika bekerja sejak awal sudah di kontrak, di beri pelatihan dan memperoleh hak-hak lainnya.

- Perempuan-perempuan yang berada di wilayah konflik hingga saat ini sesuai dengan hasil temuan masih mengalami kemiskinan yang terus berlanjut karena adanya stigmatisasi. Perempuan di Papua lebih parah kondisinya karena selalu dianggap sebagai kelompok gerakan separatis, padahal mereka adalah perempuan-perempuan yang selama ini belum memperoleh haknya dan masih berada dalam pengungsian.
- Bentuk lainnya adalah kekerasan terhadap perempuan akibat politisasi dan kebijakan berbasis moralitas dan agama. Seperti kita ketahui, sejumlah masyarakat sipil dan komnas Perempuan pernah mengajukan judicial review terhadap PNPS No 1/1985 karena di dalam PNPS hanya mengakui 6 agama. Persoalan agama ini menjadi sangat penting ketika hanya diterjemahkan 6 agama, akibatnya adalah perempuan-perempuan dan laki-laki yang menikah di luar 6 agama yang ada tidak dicatatkan sehingga hal ini berimplikasi terhadap anak-anak mereka karena tidak dapat memperoleh akte kelahiran
- Kekerasan terhadap perempuan dalam pelanggaran HAM masa lalu dan konflik. Jadi sampai hari ini perempuan-perempuan Gerwani pada peristiwa 1965 sampai saat ini masih terus hidup dalam keprihatinan karena masih ada stigmatisasi dan pembungkaman sehingga mereka tidak dapat memperoleh hak-haknya secara baik sebagaimana warga masyarakat yang lain.
- Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks perkawinan dan keluarga. Implementasi UU PKDRT masih kurang di dukung oleh hukum formal. Ada UU PKDRT yang sangat baik tetapi tidak di atur dalam KUHP sehingga masih mengalami kesulitan dalam pengimplementasiannya. Serta masih adanya aturan-aturan yang memperbolehkan poligami, memperbolehkan perkawinan sirih, memperbolehkan, perkawinan di bawah umur dan sulitnya perkawinan beda agama. Semua ini memiliki kontribusi yang besar terhadap kerentanan perempuan dalam kehidupan perkawinan. Saya berharap pada kesempatan ini ada kehadiran pak Ganjar



sehingga dapat berinisiatif untuk merevisi UU perkawinan No 1/1974 menjadi prioritas ke depan.

- Kekerasan terhadap perempuan dalam praktek budaya. Di beberapa wilayah, konsep perkosaan tidak dikenal oleh masyarakat kita sehingga konsep perkosaan disamakan dengan tindakan perempuan karena suka sama suka. Akibatnya mereka dikawinkan atau keduanya diminta untuk membayar denda untuk menghilangkan rasa malu di wilayah itu. Hal-hal seperti ini yang tadi disebutkan oleh Bank Dunia bahwa institusi sosial masyarakat, adat dan sebagainya memberikan kontribusi susahnya menghapus diskriminasi terhadap perempuan.
- Kekerasan terhadap perempuan melalui praktek politik terjadi dalam pemilu dan pemilukada. Seperti kita ketahui di beberapa wilayah banyak perempuan yang hanya dijadikan "boneka" oleh para suaminya untuk melanggengkan kekuasaan yang terjadi, misalnya di Kediri dan Banten.
- Persamaan hak dalam pendidikan, secara umum baik oleh Bank Dunia maupun Ibu Danti mengatakan bahwa kesetaraan di tingkat pendidikan sudah hampir sama. Saya ingin memberikan gambaran bahwa Komnas Perempuan menemukan anak-anak Ahmadiyah akibat konflik agama mereka mengalami refitimisasi. Dalam hal ini mereka distigma sebagai masyarakat yang berbeda dan hak-hak mereka tidak terpenuhi serta anak-anak mereka tidak dapat menempuh pendidikan dan mengikuti ujian. Selain itu, masih ada kasus di sekolah-sekolah melarang anak-anak perempuan yang hamil untuk tidak mengikuti ujian. Meskipun tahun ini 2011 sudah tidak ada yang melakukan pelaporan terkait isu tersebut tetapi tahun sebelumnya masih terjadi. Selain itu juga ada perda tes perawan di Jambi bagi penerimaan siswa baru bagi peningkatan mutu pendidikan di Jambi.
- Terkait perempuan dan migrasi. Pertama, ternyata bukan hanya masyarakat yang tidak memahami migrasi aman tetapi sebagian besar pemangku jabatan juga belum mengetahui migrasi aman. Misalnya, dianggap bermigrasi aman berarti mereka yang berdokumen, tetapi Komnas Perempuan menemukan fakta bahwa mereka yang menjadi korban trafiking adalah mereka yang juga berdokumen. Sehingga kami menghindari kata-kata legal dan tidak legal karena acuan yang hanya dokumen tetapi kami lebih mengedepankan bermigrasi aman atau tidak aman karena berdokumen belum tentu aman bagi perempuan yang bermigrasi karena seringkali dokumen-dokumen itu dipalsukan. Kedua,

mekanisme perlindungan dan penanganan yang tidak komprehensif seperti yang tadi dipaparkan oleh Bank Dunia secara umum perempuan yang bermigrasi menjadi PRT dan masih dinilai sebagai pencari nafkah tambahan. Terkait dengan pencari nafkah tambahan saya juga ingin berbagi bahwa dua bulan yang lalu kami menemukan fakta bahwa perempuan-perempuan yang bekerja di Bank BNI dan BRI juga hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan sehingga anak-anaknya dan suaminya tidak memperoleh hak kesejahteraan padahal belum tentu suaminya adalah laki-laki yang bekerja. Kalau kita berbicara mengenai strategi gender maka kita tidak membedakan lagi laki-laki dan perempuan dan siapa yang memberikan kontribusi.

- Isu terkait kesehatan dan keluarga berencana. Sebelumnya saya mohon maaf karena hal ini sudah menjadi rekomendasi dari Universal Periodic Review (UPR), kementerian kesehatan yang masih membolehkan sunat perempuan merupakan suatu isu penting yang harus diperhatikan dan di tangani secara serius. Terkait apa yang saya sampaikan bahwa ternyata diskriminasi yang menjadi dasar dan pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan, kalau Bank Dunia menawarkan empat hal sebagaimana yang disampaikan melalui persentasi oleh Mr. Andrew. Kami juga ingin mengusulkan bahwa empat isu tadi strateginya bisa dilakukan melalui tiga elemen menuju keadilan gender. Pertama, melalui perangkat kebijakan karena meskipun sudah ada Impres No 9/2000 dan CEDAW tetap perlu diterjemahkan dan diimplementasikan. Kebijakan dalam hal ini secara filosofis mengatur bagaimana implementasi komitmen pemerintah Indonesia terhadap konstitusi yang memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan, UU No.7/1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, UU HAM, Konvenan EKOSOK dan konvenan SIPOL. Kedua, kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan menjadi payung hukum perlindungan bagi semua kalangan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa kita memiliki Inpres, tetapi Inpres tersebut mengasumsikan bahwa yang memiliki kewajiban hanya pemerintah. Maka dibutuhkan sebuah RUU untuk mendorong penghapusan diskriminasi gender melalui peraturan perundang-undangan yang bisa menjadi suatu payung bagi pengarusutamaan gender yang substantif menuju keadilan gender. Bukan hanya untuk pemerintah tetapi juga badan legislative, yudikatif dan koorporasi. RUU harus mampu merumuskan peran dan posisi kewajiban negara, kewajiban legislatif, kewajiban yudikatif dalam rangka menghapus diskriminasi gender dan mewujudkan keadilan termasuk apa yang harus dilakukan oleh koorporasi dan masyarakat. Ketiga, RUU yang

dibutuhkan harus dapat menjamin pengaturan derivatifnya artinya setelah ada UU harus disertai dengan peraturan pemerintah yang dapat memastikan peraturan ini dapat berjalan serta dalam kebijakan ini harus ada sangsi.

- Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan bahwa muatan-muatan substantif yang memastikan penghapusan diskriminasi gender dan mewujudkan keadilan gender menjadi sangat penting hadir melalui sebuah rancangan kebijakan dan harus diimplementasikan tidak hanya oleh eksekutif tetapi juga yudikatif dan korporasi.

Terima kasih.

- **Bapak Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR-RI**

Bapak dan ibu yang saya hormati, selamat siang

Topik yang akan saya presentasikan hari adalah "Perspektif atau Mekanisme DPR Untuk Memastikan Kebijakan Pengarusutamaan Gender". Pada kesempatan ini saya hanya ingin berbicara pada wilayah lokal saya tentang apa saja yang mesti diperhatikan.

- Saya ingin memulai dengan sebuah dialog yang saya kutip dari BBC pada tanggal 7 Maret, "Kita tahu ada perwakilan perempuan di DPR, tetapi dengan lahirnya UU ketenagakerjaan tidak memberi perlindungan pada buruh perempuan dan menunjukkan ketidakmampuan pemahaman bagaimana membuat kebijakan", sebuah kritik luar biasa yang dilakukan oleh Ibu Nining. Kemudian tuduhan ini direspon oleh seorang anggota DPR bahwa itu tuduhan yang logis. Sesungguhnya ada satu konfirmasi oleh Eva bahwa "menurutnya kelemahan ini tidak hanya dimiliki oleh politisi perempuan tetapi juga laki-laki. Terutama mereka yang baru terpilih karena mereka hanya dianggap menjadi calon yang meraut suara karena popularitas".
- Seperti tadi yang di sampaikan oleh Bapak Mayong, bentuk-bentuk partisipasi perempuan dan laki-laki di ranah public, sesungguhnya permasalahannya dimana?
- Menurut saya pembagian kerja yang paling kuat bagi laki-laki dan perempuan adalah pembagian kerja publik dan privat. Di mana wilayah publik di dominasi oleh kaum laki-laki sebagaimana yang dipaparkan dari hasil penelitian Bank Dunia dan pemaparan ibu-ibu tadi.

- Menurut komitmen saya bahwa kemajuan itu memang ada bahwa kemudian kemajuan itu dinyatakan belum signifikan saya akan mengamini dan memang harus diakui. Tetapi kalau dikatakan tidak ada kemajuan tidak juga. Komitmennya ada melalui konvensi CEDAW, ICPD, MDGs dan kemudian kita turunkan dalam pelaksanaannya yang tentu saja perlu harus dipertanyakan.
- Pasca reformasi sebenarnya kuota 30% menjadi sangat populer. Kalau saya ke daerah pemilihan, seringkali saya mengatakan ayo yang gender-gender ke depan, artinya kalau berbicara gender tentu saja perempuan dan laki-laki. Maka edukasi dan informasi itu menjadi sangat penting dan itu harus diakui. Tetapi kemudian hampir di seluruh perdebatan politik rakyat menjadi sangat populer dan seringkali pengambilan kebijakan selalu diintroduksi. Bagaimana kekuatan kuota 30% itu coba diintroduksi. Ketika saya iseng-iseng menanyakan mengapa hanya 30% bukan 50 atau 70%, ternyata masih banyak yang belum tahu sejarahnya. Ketika diperdebatan pemilu kemarin banyak teman-teman laki-laki di DPR mengatakan "Mas inikan membelenggu perempuan kalau 30% itu, mestinya dilepas saja". Saya menjawab bahwa, kalau dilepas maka keterwakilan perempuan akan mengalami kemunduran. Ibaratnya kalau orang mau lomba lari garis startnya aja sudah berbeda bahwa laki-laki itu sudah lari duluan dan perempuan masih tertinggal di belakang. Ilustrasi di atas mencoba memberikan penjelasan pada kaum laki-laki akan pentingnya kuota 30% diperlukan bagi kaum perempuan untuk terlibat dalam politik. Meskipun sulit tetapi saya melakukannya.
- Saya selalu mengatakan bahwa kalau berbicara mengenai kehadiran perempuan jangan bicara mengenai kualitas tetapi kehadirannya dulu yang harus diutamakan. Setelah perempuan hadir baru kita membantu dengan memberi suntikan untuk meningkatkan kapasitasnya sehingga mengalami peningkatan. Karena pada saat dia menggunakan kewenangannya sebagai anggota dewan ternyata perempuan juga mampu.
- Pemahaman tentang pengarusutamaan gender ini ada instruksi presiden yang baru. Saya yakin bapak dan ibu sudah membaca semuanya pada tahun 2000 tentang apa itu gender, apa itu pengarusutamaan gender dan keadilan saya kira mesti diperjelas.
- Beberapa jaminan kesetaraan gender sebenarnya sudah ada seperti yang dibahas tadi dan saya hanya ingin menegaskan bahwa sebenarnya sudah ada komitmen-komitmen itu tetapi kesulitan yang dihadapi adalah pada pengimplementasian. Saya mencoba

menjawab, bagaimana para aktor eksekusi dalam konteks politik turut berkontribusi melaksanakannya. Memang dalam hal ini hipotesis saya belum teruji sehingga jangan di khawatirkan saat ini.

- Pengarusutamaan gender dan parlemen di Indonesia melalui demokrasi telah memberi ruang yang besar bagi perempuan untuk berperan di ranah publik termasuk berpolitik maka dukungan kuota 30% merupakan introduksi pertama perempuan masuk dalam parpol, kemudian masuk dalam pengurusan pusat. Tetapi dalam kementerian hukum dan HAM belum menunjukkan keseriusan dalam menanggapi hal ini. Sebetulnya sederhana saja, kalau suatu partai politik tidak dapat memenuhi kriteria 30% maka kementerian hukum dan HAM tidak boleh meloloskan partai tersebut. Tetapi dalam hal ini, budaya kita cukup berpengaruh dan akhirnya masuk dalam KPU dan akan terjadi hal yang sama. Ini adalah fakta empirik yang coba saya sampaikan. Persoalannya apa? Nanti akan kita diskusikan termasuk keluhan-keluhan para pengelola partai. UU baru tentang kuota 30% keterwakilan perempuan belum berubah dengan sistem zipper.
- UU MD 30 sebenarnya sudah bicara tetapi ternyata setelah dilihat mengapa bukan perempuan yang diajukan, pimpinan fraksi, pengelola lembaga dan DPR sendiri cara memilihnya berbeda-beda. Maka kalau kita berbicara mengenai perspektif yang ada masih sangat beragam. Di parlemen masih banyak perempuan-perempuan tegas (galak) tetapi yang galak itu ada dua, satu memang galak beneran yang suka marah-marah tetapi ada juga yang galak dalam arti positif dengan memiliki seting agenda yang bagus, memiliki misi yang jelas serta melekat pesan moral yang luar biasa dan memang tidak banyak perempuan di parlemen yang demikian. Oleh karena itu, keterwakilan perempuan juga layak untuk diperhitungkan tetapi dengan jujur saya katakan bahwa perhitungan di fraksi-fraksi belum menimbang hal-hal demikian. Maka ada kesempatan lain untuk membangkitkan kompetensi dan juga emosional. Ketika emosional itu muncul seharusnya gerakan itu di arahkan untuk memberdayakan perempuan yang sudah terlanjur duduk. Ketika sudah terlanjur maka kita dorong dan mensupport meski kemudian saya banyak di kritik oleh teman-teman di DPR karena melakukan pergantian kekuasaan. Menurut saya perempuan harus di dorong dan di support sehingga mereka mampu berbicara dan menyampaikan aspirasinya barulah menanyakan agenda apa yang harus dimasukkan.
- Dilihat dari komposisi gender di parlemen, saya sangat optimis bahwa akan terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat mulai dari tahun 2004 dan 2009. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen

akan terus berlanjut hingga mencapai pemilu tahun 2014 yang akan berlangsung nanti.

- Anggota DPR perempuan pada setiap pemilu mulai dari tahun 1971-2009 grafik menunjukkan telah terjadinya peningkatan yang luar biasa. Keterwakilan perempuan itu sudah mengalami peningkatan sebelumnya lalu terjadi penurunan tetapi pasca reformasi kembali mengalami peningkatan yang cukup drastis.
- Indonesia menduduki posisi ke 64 jumlah keterwakilan perempuan dan ternyata baik gloslist maupun openlist menunjukkan banyak varian. Nanti perlu dibaca-baca dan dianalisis bahwa kita sebaiknya menggunakan sistem gloslist atau openlist. Sebenarnya kemarin kami ingin melakukan diskusi dengan para aktivis perempuan. Jikalau teman-teman mendukung gloslist maka kami akan mempertimbangkan posisi satu, dua, dan tiga dibuat dengan metode nomor satu atau nomor dua salah satu harus perempuan. Tetapi trik politiknya saya mau tertutup karena nanti akan panjang.
- Soal keuangan dalam partai politik saya kira Kompas minggu lalu sudah menuliskan berturut-turut dan belum ada yang bisa menjawab hal tersebut. Karena hal itu bisa menjadi pintu money laundry, bisa menjadi uang gelap termasuk pelacuran dan narkoba karena tidak ada pertanggung jawaban setiap calon terkait biaya kampanyenya. Yang dipertanggungjawabkan hanya partai maka sebenarnya hal ini menjadi ruang bebas masuknya pemodal-pemodal, sehingga dalam konteks ini menunjukkan kontestasi sudah dimulai
- Pengarusutamaan gender di Indonesia dan Asia Timur, menurut saya apa yang disampaikan oleh Bank Dunia tadi dan saya mencoba mencuplik sedikit bahwa persamaan gender berkontribusi terhadap produktifitas SDM, kesempatan memperoleh akses ekonomi, keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga publik. Hal ini menarik berhubung kita sedang membahas UU aparatur sipil negara, kontribusi yang menarik dan serius dibicarakan kemarin di antara kami terkait UU rekrutmen JPNS yang sudah dilakukan sejak awal. Komposisi ini sudah dimulai dari rekruten awal, tetapi apabila dilepas akan berkontestasi di atas. Ketersediaanya perempuan dalam hal ini masih kurang, dan kekurangan ini akan diterobos dengan membuka jabatan eksekutif untuk memberikan posisi pada jabatan-jabatan birokrasi top level kemudian eselon-eselon tinggi. Selanjutnya akan dinilai dan hasil pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa pemenangnya adalah perempuan. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa apabila kita membuka ruang yang adil bagi laki-laki dan perempuan

secara maka perempuan juga dapat menunjukkan kemampuan untuk menjadi pemimpin, namun sangat disayangkan bahwa hal ini tidak terjadi dalam PNS kita.

- Dari cuplikan hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa minat perempuan di berbagai bidang pekerjaan dan pendidikan memang sudah terlihat terjadi peningkatan tetapi masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Apakah mungkin hal ini dikarenakan *sens of care* seorang perempuan sehingga lebih memilih jenis pekerjaan yang dapat memberi keleluasaan dan fleksibel atau ada hal lainnya.
- Sesuatu yang harus kita pikirkan bersama adalah tantangan perempuan dalam berpolitik. Sesungguhnya dalam pola pikir masyarakat kita hingga saat ini masih menganggap bahwa perempuan tidak layak untuk berpolitik. Saya sendiri ketika membicarakan hal ini banyak ditentang. Namun demikian saat ini di parlemen kita sudah dapat menemukan banyak perempuan-perempuan hebat yang berdebat tetapi di daerah kebanyakan perempuan mengalah dan tidak ingin berdebat dengan kelompoknya yang didominasi oleh laki-laki.
- Kaderisasi perempuan di partai masih lemah dan memang harus diakui bahwa ini adalah fakta yang ada di sekitar kita. Hal ini dikarenakan berbagai kendala-kendala yang dihadapi oleh perempuan seperti kendala dalam melobi, kendala dalam meyakinkan, kendala dalam elektabilitas. Semua ini adalah masalah-masalah yang akan dihadapi oleh teman-teman, tetapi saya sudah berkomit dengan mereka dan kita sudah satu periode untuk membuat progres seperti itu. Pertanyaan yang ada di forum, apakah calon-calon perempuan itu sudah pas? Kalau demikian, bagi saya pertanyaan yang klasik, bagaimana saya terpilih? Dan ketika terpilih saya menyampaikan pentingnya interaksi dengan para aktivis perempuan karena ideologi mereka itu cair dan ideologi mereka akan membantu anda, manfaatkanlah jaringan mereka, skill-skill mereka untuk anda bisa masuk dalam wilayah itu.
- Strategi menuju sukses, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mau tidak mau, suka atau tidak adalah melalui pendidikan politik. Menurut saya tidak ada sistem yang lebih baik dan sudah menjadi tanggung jawab partai politik untuk menjalankannya. Saya melakukan pemantauan pada beberapa partai politik untuk mengetahui apa yang telah dilakukan terkait pendidikan politik. Padahal sewaktu saya diminta menjadi ketua pansus 1998 fungsi pertama partai politik

adalah pendidikan politik dan sampai saat ini kita memaksa masuk dalam UU partai politik melalui bantuan negara untuk partai politik, 60% adalah untuk pendidikan politik.

Terima kasih.

- **Diskusi dan Tanya jawab**

**Pertanyaan:**

- **Ibu Titi** : Berbicara mengenai kesetaraan gender ada dua hal yaitu isu pola berpikir dan dan isu manajemen pembangunan. Dari paparan Bank Dunia memang cukup baik, tetapi dalam jangka panjang hal ini tidak dapat merubah secara mendasar karena menurut saya para perencana pembangunan di Indonesia sudah responsive gender. Ke depannya, program yang kita perlukan adalah engendering governance dan yang berperan dalam hal ini adalah DPR. Tetapi persoalan yang kita hadapi bahwa di DPR sendiri masih banyak yang belum memahami gender. Oleh karena itu, usulan saya bahwa pemahaman ini sudah harus dimulai dari sekarang. Seperti tadi yang bapak Ganjar sebutkan mengenai kuota 30% keterwakilan perempuan semuanya omong kosong. Misalnya di KPU juga memiliki ketentuannya yang sama tentang keterwakilan perempuan 30%. Jika mengimplementasikan kuota yang ada maka seharusnya ada 2 perempuan dari 7 orang di KPU tetapi DPR hanya meminta satu orang perempuan. Oleh karena itu, secara de facto kita masih tertinggal jauh terkait isu kesetaraan gender. Terima kasih.
- **Ibu Imas**: Pertama, kesulitan yang kami hadapai adalah ketika berhadapan dengan pemda ketika ingin memperkenalkan apa itu kesetaraan gender serta dipersulit dengan proses birokrasi yang ada. Tetapi kita sudah melakukan dialog dan syukurlah saat ini dari dinas UKM dan KPPA sudah memahami bahwa pentingnya ekonomi dalam kesetaraan gender. Kedua, yang paling sulit adalah merubah pola berpikir dan persepsi yang ada dalam masyarakat. Ketika kami mendatangi kantor pemerintahan bicara mengenai kesetaraan gender selalu dianggap mengajarkan perempuan untuk melawan laki-laki atau mengajarkan perempuan kurang ajar terhadap suaminya, sehingga pada tahun pertama proyek kami terpental. Justru di kantor pemerintah mengatakan bahwa apabila kita memberikan kesempatan bagi perempuan maka lahan kita akan habis. Ketiga, faktor budaya. Salah satu program kami adalah meningkatkan akses perempuan ke perkreditan. Tetapi hal ini ditentang lagi oleh pusat sampai daerah. Kalau perempuan diberi akses untuk mengakses kredit maka akan menimbulkan peningkatan perceraian. Ini semua adalah pertentangan-pertentangan yang dibangun dari pola berpikir masyarakat kita. Dalam penelitian Bank



Dunia sendiri, bagaimana meningkatkan kesetaraan gender tetapi tetap harmonis?

- **Ibu Susi:** berbicara mengenai tantangan menuju keadilan gender dari pembangunan berperspektif gender di Indonesia dan Asia Timur, saya melihat keterkaitan yang erat antara pembangunan, kebijakan publik dan kesetaraan gender karena tidak akan sukses suatu pembangunan tanpa adanya kesetaraan gender serta kesetaraan gender sendiri sangat bergantung pada kebijakan publik yang mendukungnya. Jika dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Endrow melalui empat area prioritas yang juga menyangkut kebijakan public jelas bahwa perlu adanya pendidikan politik bagi perempuan agar bisa tercapai apa yang diharapkan bersama melalui kesetaraan gender yang mendukung pembangunan. Berbicara mengenai kebijakan publik, telah ada RUU KKG yang hangat dibicarakan dalam komisi XIII DPR-RI maka saya mewakili Kowani menyatakan bahwa pada prinsipnya kami mendukung adanya RUU KKG dengan di dasarkan pada pemikiran bahwa Indonesia sebagai anggota PBB dan juga telah menyetujui MDGs serta visi Kowani jelas-jelas menyebut kesetaraan gender. Saya kagum terhadap statmen bahwa berbicara mengenai kesetaraan gender tidak hanya berbicara mengenai penghasilan atau penghapusan kemiskinan tetapi memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menyalurkan aspirasinya. Pertanyaannya untuk Mr. Andrew adalah dari empat prioritas jika dikaitkan dengan budaya Indonesia, bagaimana mengatasi hal-hal yang menjadi prioritas ini?
- **Ibu Wijayanti:** apa yang terjadi di Indonesia sangat tergantung pada kebijakan, tetapi kebijakan itu menjadikan orang Indonesia menjadi "jahat dan sangat diskriminatif". Pertanyaannya, pertama, Indonesia telah terbagi menjadi koridor-koridor yang sangat menekankan ekonomi tetapi sama sekali tidak memasukan element-element kesetaraan gender dalam pembuatan kebijakan, faktanya saat ini banyak kebijakan yang tidak memperhitungkan berapa banyak warga yang tidak dapat menikmati lahan yang ada. Bagaimana Indonesia mengatasi kebijakan-kebijakaan yang dapat merusak SDA sendiri? Kedua, kesetaraan gender perlu disadari bahwa patriarkis juga terus meningkat. Meskipun secara data untuk membuktikan peningkatan patriarkis tidak kita miliki tetapi kita bisa melihat pembicaraan orang tentang poligami meningkat, kawin siri juga meningkat dll. Sebenarnya sampai saat ini kita sebagai kaum perempuan belum menunjukkan adanya perlawanan terhadap peningkatan patriarki itu sendiri. Bagaimana tanggapan perempuan untuk menyikapi poligami? Selain itu seksisme di Indonesia juga terus meningkat?

**Jawab**

- **Mr. Andrew Mason:** saya ingin mengklarifikasi apa arti dari isu kesetaraan gender itu sendiri. Berbicara mengenai kesetaraan berarti kita berbicara mengenai kebebasan. Kesetaraan gender adalah isu penting dalam pembangunan suatu masyarakat yang terdiri dari populasi yang satu dapat menikmati kebebasan dan pilihan sedangkan yang lainnya terpinggirkan. Sebagaimana yang dipaparkan dalam laporan ini jelas bahwa pembangunan selayaknya dirasakan secara merata melalui partisipasi, kontrol dan manfaat yang diperoleh. Menurut saya itulah tujuan utamanya bahwa laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Kedua, bahwa memang tidak semua orang dapat menikmati hasil dari suatu kebijakan yang ada, tetapi dalam kesempatan ini diperoleh suatu informasi yang baik bahwa akses untuk memperoleh kesempatan dan pilihan untuk semua orang adalah sesuatu yang sangat baik bagi pembangunan melalui pembangunan yang merata bagi laki-laki dan perempuan. Kami tidak melihat bahwa kesetaraan gender menjadikan pembatas laki-laki dan perempuan tetapi justru memberikan kesempatan bagi semua orang. Sehingga dalam penelitian ini kami memfokuskan pada kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, lapangan pekerjaan dan semua kalangan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memperoleh manfaatnya. Ketiga, saya juga ingin menyampaikan term secara spesifik bahwa saya telah banyak menemukan bukti perempuan memperoleh akses terhadap kredit telah dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangganya, mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi bagi anak-anaknya untuk pendidikan, kesehatan serta mempengaruhi perekonomian di masa depan yang lebih baik. Tetapi saya belum menemukan adanya bukti bahwa apabila perempuan diberikan akses kredit menghancurkan keluarganya. Saya ingin memberikan salah satu contoh di luar Indonesia bagaimana akses kredit bagi perempuan dapat membantu kesejahteraan keluarga. Di negara yang sebagian besar penduduknya muslim seperti Banglades secara umum kondisi perempuan memiliki kesamaan dengan kondisi perempuan di Indonesia. 20 tahun yang lalu perempuan di Banglades memiliki persoalan besar terkait ekonomi dalam rumah tangganya. Pemerintah mengupayakan pendidikan bagi perempuan muda dan saat ini anak perempuan dan laki-laki memperoleh pendidikan yang setara. Civil society sangat aktif melakukan revolusi melalui kredit mikro. Dengan adanya kredit mikro ini, perempuan di Banglades dapat merubah nasib mereka dan turut serta memperbaiki perekonomian di negaranya serta menarik masuknya investor manufaktur masuk dan melakukan penanam modal. Perempuan akhirnya mampu terlibat dalam perekonomian di sektor formal sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan menurunkan angka kemiskinan. Hal ini membuktikan bahwa transformasi sosial perlu dimulai dari civil society, pemerintah dan korporasi. Sekali lagi saya ingin menekankan

bahwa dari berbagai kajian yang telah dilakukan tidak ada pembuktian bahwa dengan memberikan kredit bagi perempuan dapat menghancurkan rumah tangga dan keluarganya.

- **Ibu Sri Danti Anwar** : cukup menarik apa yang disampaikan oleh ibu Titi bahwa masalah gender itu merupakan masalah pola pikir. Tetapi saya juga ingin menambahkan bahwa gender tidak hanya pada pola pikir tetapi masih ada beberapa permasalahan lain yang memang perlu dilihat kembali terutama di Indonesia terkait upaya mewujudkan kesetaraan gender. Pertama kita bisa menghapus diskriminasi gender dan menghilangkan pandangan-pandangan yang memosisikan perempuan sebagai kelas kedua baik di ranah privat maupun di ranah public. Selain itu juga ada pelabelan yang memosisikan perempuan sebagai makhluk lemah, perempuan harus feminine dan laki-laki harus jantan, macho juga perlu dipertimbangkan dan dihapuskan sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Selanjutnya terkait tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu upaya yang perlu dilakukan apabila kita berbicara bagaimana mewujudkan kesetaraan gender. Disamping itu perlu dilihat kembali relasi gender yang ada, relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan selama ini seperti apa di Indonesia. Kemudian, pendidikan juga merupakan hal penting kalau kita berbicara dalam konteks untuk mengubah pola pikir, status dan kedudukan laki-laki dan perempuan yang setara. Lingkungan juga penting tentang bagaimana kita menciptakan lingkungan sosial budaya yang betul-betul dapat mendukung kesetaraan gender tentu saja terlebih dulu dari dalam rumah tangga dan juga dalam masyarakat. Terakhir, bagaimana kita membangun nilai-nilai baru yang demokratis dalam memberikan perlindungan hak bagi laki-laki maupun perempuan dan tentu saja dimulai dari dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan mengubah pola pikir meskipun pola pikir merupakan salah satu hambatan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Saya juga menanggapi dari sisi kebijakan, memang betul bahwa kebijakan makro ekonomi masih netral gender. Tetapi dari berbagai upaya pemerintah untuk merubah kualitas hidup perempuan sudah ada dalam program-program pembangunan nasional walaupun tidak muncul dalam kebijakan makro ekonomi tetapi sudah ada. Misalnya program PNPM yang berupaya menjawab program-program penghapusan kemiskinan. Dari sisi program-programnya dapat dilihat melalui program keluarga harapan dengan memberikan bantuan bagi rumah tangga miskin terutama rumah tangga yang ada ibu hamil. Tetapi yang menjadi konsen kita adalah dari sisi pendataan seringkali data tidak terpilah, data tersebut tidak dapat muncul di berbagai bidang sehingga saat program-program ini diturunkan yang memperoleh benefitnya tidak dapat dirasakan oleh semua orang. Berbagai keterbatasan ini kami dari KPPA terus berupaya meningkatkan kapasitas dan

kemampuan melalui advokasi tentang kesetaraan gender di berbagai bidang.

- **Ibu Ninik Rahayu;** kebijakan adalah salah satu bukan satu-satunya karena kita ketahui bahwa kondisi pengetahuan masyarakat terkait hukum dan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting sehingga tidak hanya tergantung pada aparat pemerintah tetapi bagi semua aparatur yang di dalamnya termasuk kita semua. Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang dapat memastikan bahwa penghapusan diskriminasi gender yang sekarang sedang di dorong oleh DPR melalui inisiatif DPR melalui RUU KKG yang juga difasilitasi KPPA serta sejumlah masyarakat sipil untuk memastikan bahwa penting penghapusan diskriminasi gender ini karena realitasnya bahwa ketidakadilan itu muncul dimana-mana dalam bentuk yang bermacam-macam. Tetapi hal ini perlu dibarengi dengan penguatan dan pemahaman masyarakat karena kalau kebijakan saja tidak dapat terimplementasi dengan baik kalau masyarakat tidak memiliki pemahaman yang baik dan begitu juga dengan aparat kita baik badan legislative, yudikatif dan korporasi
  
- **Bapak Iskandar;** Pertama, DPR memang sudah berinisiatif tetapi persoalannya seperti tadi saya sampaikan bahwa program DPR mulai dari program rekrutment dan peta-peta yang ada hari ini suka tidak suka, mau tidak mau voting itu harus dilakukan melalui partisipasi yang memang konsen pada persoalan ini. Itu yang kita tidak mengerti dan tidak dipahami sehingga hal ini akan diminta pada proses pencalegan akan dimulai. Kalau kita berbicara dimulainya secara seluruhnya sudah mulai bisa dilakukan observasi partai mana memilih apa atas dasar apa dan kemudian ketika menduduki maka posisi kesetaraan itu harus ada di situ, semua ini dapat dinilai. Kedua, soal KPU memang betul, saya mengatakan ngak perlu voting deh tapi melalui musyawarah karena harus ada partisipasi 30% perempuan. Tetapi tidak ada yang yakin, kata mereka kalau tidak voting tidak ok, sudahlah pak Ganjar kita akan melakukan voting. Kalau anda tidak mau ada dua caranya, pertama di vote untuk perempuan dulu kemudian baru di vote untuk semuanya. Kalau sudah begini kondisinya, kesetaraan gender mau dipaksakan dan melupakan bahwa ada afirmasi dan itu memang terjadi. Saya orang yang meyakini kalau musyawarah dapat mewujudkan keterwakilan perempuan melalui kuota 30% tetapi kalau di vote maka saya sendiri tidak yakin.

- **Simpulan moderator seminar**

Seminar kita mengenai “Menuju Kesetaraan Gender di Asia Timur dan Pasifik ” tidak akan sampai pada satu kesimpulan. Namun selama empat jam seminar

berlangsung dapat diperoleh suatu pemahaman bahwa persoalannya adalah persoalan pola pikir sehingga akan mencapai pada langkah-langkah yang akan dilakukan dan bagaimana kita akan menata negeri ini serta memberi persamaan hak bagi kaum perempuan. Hal ini merupakan persoalan yang sangat lama, sudah berjalan bertahun-tahun dan tentu kita tidak ingin berhenti sampai di sini tetapi masih membutuhkan perjuangan-perjuangan yang terus berlanjut. Tetapi secara kelembagaan KPPA, Komnas Perempuan, Komisi II DPR-RI memperoleh pendalaman pemahaman bersama melalui hasil kajian Bank Dunia. Ini adalah langkah kita bersama dan perjuangan kita bersama sehingga setelah keluar dari ruangan ini kita menjadi manusia yang baru dan memiliki pandangan yang berbeda tentang kesetaraan gender. Saya Mayong Laksono mengucapkan terima kasih bagi hadirin semua, dan terima kasih bagi para pembicara.

### **III. Acara Penutup**

Penyerahan cenderamata oleh ketua Program Studi Kajian Gender, Dr. Kristi Poerwandari kepada para narasumber seminar menuju kesetaraan gender di Asia Timur dan Pasifik.